
Analisis Kebijakan Kampung KB Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kota Cirebon

Siti Khumayah, Dharliana Hardjowikarto dan Yulistiani

Universitas Swadaya Gunung Jati

Email: mayasiti1718@gmail.com, dharlianahardjowikarto18@gmail.com,
yulistiani03@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Received : 13-10-2020

Revised : 18-10-2020

Approved : 20-10-2020

Key words :

Policy; KBvillage;
poverty alleviation

Abstract: *The purpose of the study was to determine the implementation of the DPPKB KB village policy for poverty alleviation in Lemahwudul District, Cirebon City. The research method used a descriptive qualitative approach with the aim of analyzing comprehensively and in depth about the policy of the KB Village in the Family Planning Population Control Office, especially in Lemahwudul District, Cirebon City. The results of the success of the KB village program policies include commitment to human resources and funding that are committed to the goal of achieving the success of the policy for the welfare of the community. The completeness of the infrastructure also supports the success of this program and will continue to be improved by the DPPKB in achieving policy resources, characteristics, implementing agencies and existing economic, social and political conditions. The socioeconomic level has begun to show an increase in the number of population consumption which is reduced and more allocated to higher quality consumption such as eating sufficient nutritious food due to lower household needs.*

Abstrak: Tujuan Penelitian untuk mengetahui Implementasi Kebijakan kampung KB DPPKB guna penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon. Metode Penelitian menggunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk menganalisis secara komprehensif dan mendalam tentang kebijakan Kampung KB di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Khususnya di Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon. Hasil dari Keberhasilan kebijakan program kampung KB diantaranya komitmen sumber daya manusia dan pendanaan yang komitmen pada tujuan tercapainya keberhasilan kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat. Kelengkapan sarana prasarana pun menunjang keberhasilan program ini dan akan terus ditingkatkan oleh DPPKB dalam pencapaian sumber-sumber kebijakan, karakteristik, badan pelaksana dan kondisi ekonomi, sosial masyarakat serta kondisi politik yang ada. Tingkat sosial

Kata kunci : ekonomi pun mulai terlihat peningkatan dari jumlah konsumsi penduduk yang berkurang dan lebih dialokasikan kepada Kebijakan; kampung KB; penanggulangan kemiskinan konsumsi yang lebih berkualitas seperti makan makanan yang bergizi tercukupi dikarenakan kebutuhan rumah tangga lebih ringan.

Koresponden author: Siti Khumayah

Email: mayasiti1718@gmail.com

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi

CC BY SA



Pendahuluan

Permasalahan kependudukan di Indonesia sangat kompleks dan beragam, dimulai dari tingginya angka kematian bayi, dan ibu, rendahnya kesadaran masyarakat akan hak-hak reproduksi, cukup tingginya angka pertumbuhan penduduk, dan penyebaran penduduk itu sendiri yang belum merata diseluruh wilayah Indonesia (Hidayat, 2013). Jumlah penduduk yang sangat besar ini dapat mempengaruhi aspek kehidupan baik ekonomi maupun sosial, terutama kualitas hidup masyarakat yang menjadi bagian terpenting dalam pembangunan sebuah Negara (Utomo, 2014).

Menyikapi akan hal tersebut, pemerintah membuat sebuah program yang berfokus pada permasalahan penduduk terutama untuk menekan laju pertumbuhan penduduk dan menjadikan penduduk ini berkualitas sehingga kedepan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan, program yang digulirkan pemerintah adalah Keluarga Berencana (KB) yang bertujuan untuk menunjang keberhasilan pembangunan dan kualitas hidup penduduk Indonesia itu sendiri dan dijalankan oleh Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang merupakan badan non kementerian yang terdapat ditingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang berada di kecamatan dan kelurahan/desa.

Dimana Badan kependudukan ini mempunyai fungsi juga untuk mengentaskan kemiskinan yang masih menjadi momok menakutkan bagi pembangunan. Menurut (Nanang, 2011), kemiskinan adalah salah satu dampak sosial pembangunan karena pembangunan dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan antar penduduk. Kemiskinan merupakan sebuah kondisi ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup minimal (sandang, pangan dan papan). Sebagaimana Juariyah juga menyatakan masyarakat yang mempunyai tingkat sosial ekonomi yang rendah cenderung memiliki tingkat pendidikan yang rendah pula. Masyarakat masih kurang memahami akan pentingnya pendidikan (Juariyah, 2010).

Kota Cirebon sendiri merupakan wilayah pantai, dimana dalam catatan BKKBN wilayah pantai adalah menjadi salah satu wilayah atau daerah rawan tingginya pertumbuhan penduduk, Dibawah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Cirebon membuat suatu program pengendalian penduduk dan pengentasan kemiskinan, yaitu melalui program Keluarga Berencana yang difokuskan pada masyarakat dengan ekonomi terbelakang, dengan perbaikan pendidikan dan ekonomi melalui program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBP) yang juga merupakan program

nasional yaitu “Kampung KB” atau lengkapnya “Program Kampung Keluarga Berencana” dengan ditudingkannya Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai dasar Pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana menekan kewenangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) untuk tidak memfokuskan pada masalah pengendalian penduduk saja namun masalah pembangunan keluarga berencana juga. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kota Cirebon melanjutkan program Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan program kampung KB nya. Dan dari 5 Kecamatan yang terdapat di Kota Cirebon, Kecamatan Lemahwungkuk terpilih untuk menjadi pilot project penyelenggaraan kampung KB tepatnya di Kelurahan Pegambiran, dengan dikeluarkannya Keputusan Nomor:476/SK.10/Kel.Pgb/2019 tentang Pembentukan Kampung KB Kriyan Barat RW.17 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon. Dan diharapkan kebijakan yang dibuat ini mencapai keberhasilan dalam pelaksanaannya, seperti halnya menurut Van Meter dan Van Horn dalam (Winarno, 2016) berpendapat bahwa: “Implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintahan atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya”. Namun dalam pelaksanaannya tentu saja masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan yang harus diselesaikan bersama, seperti: 1). Anggaran yang belum optimal; 2). Ketidaktahuan masyarakat akan program kampung KB; 3) Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di Kecamatan Lemahwungkuk dengan angka kelahiran yang tinggi.

Hal inilah yang mendasari peneliti untuk lebih jauh melakukan penelitian tentang kebijakan program kampung KB guna penanggulangan kemiskinan dengan menekan laju pertumbuhan penduduk.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk menganalisis secara komprehensif dan mendalam tentang kebijakan Kampung KB di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Khususnya di Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon.

(Arikunto, 2013) mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif seorang peneliti berlaku sebagai human instrument dan dengan teknik pengumpulan data participant observation (observasi berperan serta) dan in depth interview (wawancara mendalam), maka peneliti harus berinteraksi dengan sumber data.

1. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan atau Literatur
- b. Studi Lapangan
- c. Observasi
- d. Wawancara

2. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Teknik pengujian keabsahan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi yaitu (*check, recheck, crosscheck*) berbagai data yang diperoleh dari berbagai sumber, dari berbagai cara/teknik, dan dari berbagai waktu. Teknik analisis

data yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif yaitu menggambarkan keadaan sebenarnya tentang obyek yang diteliti menurut keadaan sebenarnya tentang objek yang diteliti, menurut keadaan yang sebenarnya saat penelitian berlangsung.

Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Kebijakan Kampung KB

Kebijakan menurut Charles O. Jones dalam (Winarno, 2016) merupakan istilah kebijakan dengan tujuan (goals), program, keputusan (decisions), standar, proposal dan grand design.

Sedangkan Amir Santoso (Winarno, 2016) mengatakan bahwa:

“Kebijakan publik dibagi ke dalam dua wilayah kategori. Pertama, pendapat ahli yang menyamakan kebijakan publik dengan tindakan-tindakan pemerintahan. Kedua, para ahli yang memberikan perhatian khusus kepada pelaksanaan kebijakan”

Kebijakan itu sendiri merupakan kewenangan yang dibuat oleh pemerintah berupa tindakan-tindakan pemerintah dalam mencapai suatu proses atau tujuan tertentu untuk kepentingan bersama (Agustino, 2016).

Implementasi kebijakan sendiri merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan, dan merupakan proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan seperti halnya kebijakan program kampung KB yang merupakan salah satu kebijakan pemerintah guna pengendalian kependuduk untuk menunjang kesejahteraan penduduk, penanggulangan laju angka pertumbuhan penduduk ini diamanatkan kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) sebagai Lembaga yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBP) secara nasional (Cristianingsih, 2020).

Kampung KB sendiri adalah satu wilayah setingkat Rukun Warga (RW), dusun atau setingkat dengannya yang mempunyai keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistematis dan sistematis. Dan Kampung KB ini merupakan program strategis dalam upaya percepatan agenda program pembangunan khususnya pada daerah pinggiran.

Untuk mengukur dan menganalisis implementasi kebijakan tersebut, peneliti melakukan beberapa wawancara dan penarikan data dari narasumber yang berkompeten diantaranya adalah melalui kepala desa, lurah, dusun dan pihak terkait lainnya, dan didapat hasil bahwa pelaksanaan program kampung KB ini berjalan dengan efektif dan baik sesuai dengan prosedur kinerja kebijakan yang telah digariskan pemerintah, diantaranya melalui komitmen dari pelaksanaan tujuan kebijakan itu sendiri dengan secara periodik dilakukan juga pelatihan dan dan kaderisasi guna mendapatkan Sumber Daya yang sesuai standar kebutuhan, sehingga program dijalankan dengan disiplin komitmen dan koordinasi yang baik antar pelaksana serta adanya motivasi yang membangun dari pimpinan, serta dari segipendanaanpun dikelola dengan profesional dan proporsional, sehingga implementasi yang dicanangkan berjalan dengan baik dari keterpaduan faktor-faktor pendukungnya.

2. Pelaksanaan Kampung KB

Komitmen untuk pelaksanaan kebijakan Kampung KB di Kecamatan Lemahwungkuk berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan baik dengan

kepala dinas maupun camat dan masyarakat sekitar didapatkan hasil bahwa kampung KB ini diajarkan dan dibangun dari masyarakat tentunya dengan terus bersama-sama masyarakat dan instansi terkait, juga terdapat kelompok kerja yang berkerjasama dengan lintas sector baik social, budaya terutama ekonomi sebagai tujuan dari program ini yaitu peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Kesimpulan

Pelaksanaan program kampung KB, dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa: 1) Keberhasilan kebijakan ini karena adanya kerjasama yang baik dan terarah antar pihak guna mewujudkan perbaikan ekonomi, diantaranya komitmen sumber daya manusia dan pendanaan yang komitmen pada tujuan tercapainya keberhasilan kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat. 2) Kelengkapan sarana prasarana pun menunjang keberhasilan program ini dan akan terus ditingkatkan oleh DPPKB dalam pencapaian sumber-sumber kebijakan, karakteristik, badan pelaksana dan kondisi ekonomi, sosial masyarakat serta kondisi politik yang ada. 3) Tingkat social ekonomi pun mulai terlihat peningkatan dari jumlah konsumsi penduduk yang berkurang dan lebih dialokasikan kepada konsumsi yang lebih berkualitas seperti makan makanan yang bergizi tercukupi dikarenakan kebutuhan rumah tangga lebih ringan, dan juga dialokasikan ke Pendidikan yang berkualitas pula sehingga dapat memberikan wawasan yang memadai bagi penduduk dengan perkembangan teknologi yang pesat dewasa ini.

Bibliografi

Agustino, L. (2016). Dasar-dasar kebijakan publik (Edisi Revisi). *Bandung: Alfabeta*.

Arikunto, S. (2013). Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. *Bandung: Alfabet*.

Cristianingsih, E. (2020). Implementasi kebijakan administrasi Kependudukan di kabupaten bandung. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi, 12(2)*.

Hidayat, N. (2013). Kajian Kebijakan Kependudukan di Indonesia. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area, 1(2)*, 24–36.

Juariyah, S. (2010). Analisis kondisi sosial ekonomi dan tingkat pendidikan masyarakat Desa Srigading, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan, 7(1)*.

Nanang, M. (2011). Sosiologi Perubahan Sosial. *Jakarta: Rajawali Pers*.

Utomo, D. (2014). Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin (Studi Pada Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri). *Jurnal Administrasi Publik, 2(1)*, 29–34.

Winarno, B. (2016). Kebijakan Publik Era Globalisasi. *Yogyakarta: CAPS*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga

Keputusan Camat Lemahwungkuk Nomor:476/SK.10/Kel.Pgb/2019 tentang Pembentukan Kampung KB Kriyan Barat RW,17 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon.

Satu Data Pembangunan Jawa Barat Pusdalibang. Jumlah Penduduk Kabupaten/ Kota di Jawa Barat Tahun 2010 – 2015.<http://pusdalibang.jabarprov.go.id/pusdalibang/data-94-Kependudukan.html>. Diakses pada tanggal 24 Mei 2019

Kampung KB. Kampung KB Sebagai Wahana Pemberdayaan Masyarakat. <http://kampungkb.bkkbn.go.id/about>. Diakses pada tanggal 24 Mei 2019